



## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

*Bagian ini mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.*

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

- Sasaran Pembangunan Kota Mataram berdasarkan RPJMN 2010-2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
- Tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs).
- Hasil Review RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga nomenklatur Perangkat Daerah di Kota Mataram mengalami perubahan.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai</b>			
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Keamanan Manusia	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)
			Indeks Kota Toleran (IKT)
		Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	Persentase kejadian bencana tertangani (%)
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing</b>			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Angka Melek Huruf (%)
			Harapan Lama Sekolah (tahun)
		Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
			Angka Harapan Hidup (tahun)
	Angka Kemiskinan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	
		Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera</b>			
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita (rupiah)
			Laju Inflasi
			Indeks Gini
		Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Tingkat Kesempatan Kerja
			Rasio Ketergantungan
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan</b>			
Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni
			Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang
			Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang
<b>Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)</b>			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai AKIP
			Opini BPK
			Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Ombudsman
			Nominasi Inovasi Daerah
		Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan



Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram

(1)	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,99	8.06	8.11	8.17	8.20	8.27	8.35	8.35	BAPPEDA	
2.	Laju Inflasi (%)	3,25	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	BAPPEDA	Pertanian, KKP, Bag. Ekonomi, Koperindag, Perhubungan, BPMP2T, Humas
3.	Angka Kemiskinan (%)	10.53*	10.06	9.06	8.06	7.06	6.06	5.06	5.06	BAPPEDA	
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,28	15,55	15,82	16,09	16,36	16,63	16,90	16,90	DIKPORA	
5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,05	9,07	9,09	9,11	9,14	9,16	9,18	9,18	DIKPORA	
6.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%)	97,05	97,05	97,2	97,8	98,00	98,5	99,5	99,5	DIKPORA	
7.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	94,09	94,09	96,9	97	97,6	98	99	99	BPPKB	
8.	Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita)	29.405.765	32.878.932	36.827.151	41.210.279	46.284.582	52.035.210	58.655.461	58.655.461	BAPPEDA	
9.	Angka Indeks Pembangunan Manusia	76,37	77,34	78,31	79,28	80,25	81,22	82,19	82,19	BAPPEDA	
10.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.13	86.13	88.13	90.13	92.13	94.13	96.13	96.13	KKP	Dinas Pertanian, BP4K
11.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,15	3.52	2.88	2.24	1.61	0.97	0.33	0.33	Disosnaker trans	
12.	Jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan	8	8	12	16	20	24	28	28	KOPERINDAG	



	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
13.	Persentase penduduk ber KTP	87	90	95	100	100	100	100	100	Dukcapil	
14.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	2,54	2,49	2,45	2,34	2,33	2,21	2,2	2,2	DIKES	
15.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	9,09	36,36	54,55	72,73	90,91	100	100	100	DIKES	
16.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,00	4,13	4,08	4,03	3,98	3,93	3,88	3,88	DIKES	
17.	Persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan (%)	40/9,34	50	60	70	80	90	100	100	BPM	
18.	Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERWAL (%)	70	75	85	90	98	100	100	100	SETDA	
19.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,90	74	76	78	81	86	87	87	BPPKB	
20.	Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	13,68	18,51	23,33	28,15	32,97	37,79	42,61	42,61	Disosnaker trans	
21.	Jumlah Perpustakaan pada tempat ibadah	228	248	268	288	308	328	348	348	SETDA	
22.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	87,21	87,21	89	91	93	95	95	95	PU	
23.	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	85,90	85,90	90	95	100	100	100	100	PU	BLH, Kebersihan
24.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	67,34	67,34	77	87	100	100	100	100	PU	
25.	Persentase Rumah layak huni (%)	98,13	98,13	98,50	99	99,25	99,50	100	100	PU	BPM
26.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	12,50%	12,50 %	15 %	17,50 %	20 %	22,50 %	25 %	25 %	Pertamanan	BPKAD, LH, PU, T
27.	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang (%)	56,56	56,56	60	62,5	65	70	75	75	Tata Kota	BAPPEDA, BPMP2T
28.	Persentase penanganan sampah (%)	66,33	66,33	70	75	80	85	95	95	Kebersihan	PU, BLH



	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
29.	Target opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	
30.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	18,93/17,79	20.59	20.60	20.64	20.68	20.72	20.80	20.80	DISPENDA	
31.	Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)	23,16	24,16	25,16	26,16	27,16	28,16	29,16	29,16	BPKAD	
32.	Target penilaian maturitas SPIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	SETDA	
33.	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
34.	Kunjungan wisatawan (orang)	427.725	512.725	597.725	682.725	767.725	852.725	937.725	937,725	Disbudpar	
35.	Angka kriminalitas (kasus)	1.143	1.119	1.055	959	859	759	659	659	POL-PP	
36.	Cakupan SKPD yg menyelenggarakan informasi publik berbasis IT (%)	10	10	15	20	30	40	50	50	SETDA	
37.	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	69,2	69,2	69,2	100	100	100	100	100	SETDA	
38.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76.16	76.16	78.27	79.02	79.77	80.52	81.27	81.27	BPMP2T	
39.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	5	5	8	11	14	17	20	20	BAPPEDA	
40.	Nilai investasi (PMDN/PMA)	PMA : \$7.696.170 PMDN : 972,08 juta	PMA : \$ 285.043 PMDN : 150 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 850 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$9.046.430 PMDN : 3 trilyun	BPMP2T	
41.	Tingkat perkembangan WUB (unit usaha)	16.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.212	KOPERINDAG	
42.	Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Bidang)	5	5	6	6	6	6	6	6	SETDA	
43.	Pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah	0	0	2	2	2	2	2	10	KOPERINDAG	Bappeda, BPM, Bag Perekonomian

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2019 sebagai acuan dan pedoman transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram, digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS APBD TA. 2019

RKPD Kota Mataram Tahun 2019 disusun dengan koordinasi berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) yang dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram yaitu Forum SKPD dan Forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Fokus Group Discussion (FGD) yang berfungsi sebagai Forum untuk merevisi dan sinkronisasi Rencana kegiatan penyelenggaraan program kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen ini berfungsi pula sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan tepat sasaran dan dapat dipergunakan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar tetap sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut, melalui dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2019 diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana.

WALIKOTA MATARAM,

H.AHYAR ABDUH